

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Jepang merupakan salah satu negara di kawasan Asia Timur yang memiliki sejarah yang panjang dan unik. Salah satunya yang paling dikenal adalah pecahnya perang pasifik antara pihak kekaisaran Jepang dengan Amerika Serikat. Pada 7 Desember 1941, Jepang melancarkan serangan ke pangkalan udara Amerika Serikat di Pearl Harbor. Serangan tersebut melibatkan 350 kapal pengebom Jepang yang dibagi menjadi dua gelombang serangan. Pasukan Amerika yang tanpa persiapan tersebut harus menderita kekalahan telak dimana diperkirakan sekitar 4.500 orang menjadi korban (Henshall, 2004, hlm.124-125). Peristiwa pengeboman di Pearl Harbor ini sendiri menjadi awal dari perang pasifik yang terjadi antara pihak kekaisaran Jepang dan Amerika Serikat.

Pada masa perang pasifik ini seperti yang kita semua hampir ketahui, Jepang pernah menjajah beberapa negara negara di wilayah Asia diantaranya ada Korea, Cina, dan Indonesia. Penjajahan yang dilakukan kekaisaran Jepang ini meninggalkan luka yang melekat hingga sekarang. Salah satunya ialah dengan mengeksploitasi penduduk lokal untuk dijadikan tenaga kerja paksa. Para tenaga kerja ini diberlakukan secara kejam dan ironisnya hal ini hampir terjadi di seluruh wilayah wilayah yang pernah diduduki kekaisaran ini.

Masyarakat Indonesia sendiri memiliki kenangan buruk pada masa pendudukan kekaisaran Jepang, salah satunya ialah dengan adanya sistem Romusa pada masa pendudukan Jepang. Masyarakat Indonesia saat tersebut dipaksa untuk membangun prasarana perang (kubu kubu pertahanan, jalan raya, dan lapangan udara), maupun untuk dipekerjakan di pabrik dan pelabuhan pelabuhan. Jepang sendiri saat tersebut menyebutnya sebagai “prajurit kerja”. Akan tetapi pada hakikatnya mereka tidak lebih dari pekerja paksa. Pada umumnya mereka adalah para pemuda desa, petani, dan penganggur. Semula, pengerahan dilakukan secara sukarela. Akan tetapi, ketika kebutuhan akan tenaga semakin meningkat, dan orang

tidak mau lagi menjadi Romusa akibat tersebarnya berita mengenai kekejaman Jepang, pengerahan dilakukan secara paksa (Abdullah & Lopian, 2012, hlm.29).

Tindakan agresif yang dilakukan Jepang pada saat tersebut tidak dapat dipungkiri mengingat pada abad ke-19 politik luar negeri Jepang lebih bersikap ekspansi khususnya keinginan untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Pada tahun 1930-an pelaksanaan politik luar negeri Jepang lebih berkonsentrasi meningkatkan peranan regionalnya antara lain dengan lebih memperluas pengaruh maupun peranannya di Cina dan Korea (Irsan, 2007, hlm.40). Adanya tekanan dari dalam negeri seperti terbatasnya sumber daya alam dan kepadatan penduduk mendorong negeri matahari terbit ini untuk membentuk negara jajahannya sendiri dimana target pertama sendiri ialah negara negara di kawasan Asia Timur yaitu Korea dan Cina dan negara negara di Asia Tenggara seperti Indonesia.

Namun jika kita melihat Jepang pada masa sekarang khususnya di Indonesia, pasti tidak terlepas dari produk produknya seperti Sony, Honda, Ajinomoto dan masih banyak lagi. Meskipun tidak dapat dipungkiri sedikit demi sedikit perusahaan perusahaan asal Cina dan Korea Selatan mulai merebut pasar Indonesia dari Jepang sepertihalnya dikutip dari paparan *Bussiness Insider* (dalam CNBC Indonesia Fakhriansyah, 2023) 28,7 % produk dunia adalah buatan Cina, tidak dapat dipungkiri bahwa produk produk ekspor asal Jepang pernah menguasai pasar Indonesia. Berbagai produk buatan Jepang mulai dari pakaian, makanan, mobil sampai elektronik (laptop, handphone dan lain lain) pernah menjadi barang dominan di pasaran Indonesia. Salah satu contohnya dari bidang farmasi adanya istilah GMP (*Good Manufacturing Praticice*) yang dalam prakteknya memberikan kontribusi pada kinerja produsen pada bidang makanan dan minuman (Suseno dalam Seniwati dkk, 2021, hlm.128).

Merebaknya produk produk Jepang tersebut tidak terlepas dari terjalinnya hubungan internasional yang baik antara pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia. Salah satu bentuk hubungan internasional antara Indonesia dan Jepang ini ialah dengan adanya IJEPA (*Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*) yang merupakan perjanjian bilateral di bidang ekonomi Indonesia-

Jepang bertujuan meningkatkan impor, ekspor serta investasi di kedua negara (Avivi & Siagian, 2020, hlm.55). Dibentuknya perjanjian tersebut tidak terlepas dari upaya kepentingan nasional kedua negara tersebut. Di satu sisi Jepang mengekspor produk jadi ke Indonesia sedangkan Indonesia mengekspor bahan baku ke Jepang.

Selain Indonesia, Jepang di masa sekarang juga menjalin kerja sama dengan negara negara di kawasan Asia lainnya seperti Cina. Kedua negara ini memang memiliki tingkat ketergantungan dan hubungan ekonomi yang sangat tinggi. Pada tahun 2018, Cina menjadi mitra dagang Jepang melampaui semua investor asing lainnya dengan investasi hingga 101 miliar dolar (Rahmawati, 2022, hlm.3). Pada tahun 2018-2019, kedua negara ini juga berhasil mencapai kesepakatan kerja sama di berbagai aspek seperti kerja sama ekonomi, dialog strategis, dan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun Cina dan Jepang masih belum berhasil menyepakati perjanjian perdagangan bebas, di mana saat ini negoisasi *Free Trade Agreement* antara Cina, Jepang, dan Korea Selatan masih berlangsung, bukan berarti keduanya tidak menjalin kerja sama ekonomi yang instens (Jiangyong dalam Aini, 2021, hlm.98-99). Dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa kebijakan luar negeri Jepang di masa sekarang lebih mengarah ke pembentukan perjanjian perdagangan bebas dengan negara lain. Hal ini memang tidak bisa dipungkiri mengingat Jepang memang negara kepulauan dan memiliki sumber daya alam terbatas.

Namun bila kita lihat hubungan Jepang dan Cina sebelum perang dunia II berakhir, kedua negara ini bisa dikatakan saling bermusuhan salah satunya dengan adanya peristiwa pecahnya perang Cina-Jepang II (1937-1945) yang berawal dari insiden Jembatan Marco Polo pada 7 Juli 1937 dimana pasukan Jepang saat tersebut sudah menduduki wilayah Fengtai dekat, pertigaan rel kereta api dekat jembatan Marco Polo, Dimana saat tersebut pasukan Jepang menuntut masuk kota kecil bertembok Wanping. Insiden ini terus berkembang hingga akhirnya Jepang mencetak kemenangan beruntun dalam menekan Cina (Xia, 2008).

Tidak hanya itu bahkan pada masa perang Cina-Jepang II ada salah satu peristiwa yang telah meninggalkan luka mendalam bagi warga Cina. Salah satu peristiwa tersebut yang menjadi mimpi buruk masyarakat Cina adalah “Pembantaian Nanjing”. Singkatnya peristiwa itu terjadi pada 13 Desember 1937, dimana sekitar 100,000 pasukan Jepang memasuki kota Nanjing tanpa perlawanan besar. tujuh minggu setelah kejadian tersebut ratusan tentara Cina tak bersenjata mengalami pembantaian mulai dari menggunakan senjata seperti bayonet dan granat hingga ada yang dibakar hidup hidup. Bahkan disebutkan selama 39 hari tersebut sepertiga dari kota Nanjing terbakar oleh api (Nanda & Purnomo, 2020, hlm.50).

Dalam catatan sejarah tercatat juga bahwa kejahatan yang dilakukan Jepang diantaranya pemerkosaan, pembakaran dan perampokan. Kebanyakan korban dari pembantaian Nanjing merupakan warga sipil laki laki, hal tersebut terjadi dikarenakan komandan dari pasukan tentara Jepang meyakini bahwa tentara Cina telah menanggalkan seragamnya dan berbaur dengan penduduk. Berdasarkan data *Documents of Nanjing Massacre* dalam *International Memory of the World Register* yang diterbitkan UNESCO disebutkan bahwa terdapat lebih dari 200.000 warga sipil dan tawanan perang yang dibunuh di Nanjing (Dwiningrum, Deniar, & Rijal, hlm.112-113).

Adanya perubahan kebijakan luar negeri Jepang ini yang awalnya bersifat ekspansif menjadi pembentukan kerja sama secara damai menjadi daya tarik bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam terkait apa yang melatar belakangi pembentukan kebijakan luar negeri Jepang pada masa sebelum perang dunia II dan sesudahnya. Dalam hal ini penulis berspekulasi bahwa kekalahan Jepang pada perang dunia II menjadi salah satu faktor berubahnya kebijakan luar negeri Jepang.

Kekalahan Jepang oleh pihak sekutu pada Perang Pasifik diawali dengan pemboman Pearl Harbour oleh Jepang pada 7 Desember 1941, berakhir dengan kemenangan di pihak sekutu. Kekuatan Jepang yang pada masa awal *ofensif* benar benar runtuh dengan dibomnya kota Hiroshima dan Nagasaki oleh pihak sekutu pada 6 dan 9 Agustus 1945 (Agung, 2012, hlm.89). Semenjak saat

tersebutlah Jepang memasuki masa istimewa yaitu era pendudukan oleh Amerika Serikat.

Pada masa pendudukan inilah para perdana menteri Jepang mempunyai peran penting dalam memulihkan kembali hubungan nasional negara negara di kawasan Asia pasca berakhirnya perang dunia II tidak terlepas dari kebijakan kebijakan yang diusulkan pada masa menjabat pada periode tersebut. Salah satu perdana menteri Jepang yang mempunyai pengaruh besar dalam suksesnya Jepang di masa sekarang ialah Shigeru Yoshida. Kebijakan yang dikeluarkan Yoshida pada jabatannya mampu mengatasi krisis ekonomi dan politik yang terjadi di Jepang pada masa pendudukan Amerika. Kebijakan atau doktrin tersebut bahkan sempat dipertahankan sebagai dasar pemulihan negara Jepang hingga sampai pada 1976. Selain Shigeru Yoshida, aktor politik Jepang yang berpengaruh di Asia Pasifik adalah Perdana Menteri Takeo Fukuda dimana ia memperkenalkan kebijakan atau doktrin baru yang lebih berfokus ke Jepang agar memainkan peranan penting di Asia Tenggara (Purbantina, 2013, hlm.42). Kebijakan kebijakan tersebut selain mempengaruhi Jepang, negara negara di sekitarnya terkena dampak salah satunya dengan adanya terbentuknya perjanjian mitra kerja sama antara Jepang dengan negara negara di kawasan Asia seperti Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan lain lain

Tindakan para Perdana Menteri Jepang dalam memulihkan nama baik Jepang di mata dunia menjadi alasan lain penulis tertarik untuk membahas masalah ini lebih lanjut mengingat dalam menjalankan politik luar negeri barunya Jepang dihadapkan beberapa tantangan, salah satu utamanya ialah ketegangan dalam hubungan dengan negara negara tetangganya akibat sejarah Perang Dunia II dan isu isu terkait sejarah dan wilayah yang sensitif. Salah satu contohnya yang sampai masih berlangsung sampai sekarang adanya sengketa pulau Dokdo/Takehsima oleh Jepang dan Korea Selatan. Sengketa ini sendiri sudah terjadi sejak tahun 1905 dimana kedua negara ini mengklaim pulau ini berdasarkan geografis dan historis atas kepemilikannya. (Gardina, 2018, hlm.61). Kasus lainnya ada pada Jepang dan Rusia terkait sengketa pulau Kuril. Sengketa Pulau Kuril Selatan yang saat ini berada di tangan Rusia merupakan hasil akhir dari kesepakatan sebelum dan setelah

Perang Dunia II. Namun adanya ketidaksetujuan yang dilakukan pihak Jepang menjadikan keambiguan dalam status kepemilikan pulau tersebut (Larasati, 2018, hlm.66). Selain sengketa wilayah, kekejaman Jepang yang pernah dilakukan pada masa perang dunia II meninggalkan dendam hingga sekarang, salah satunya pemerintah Cina membuat kebijakan untuk mengingat dan mengenang kejadian memilukan di Nanjing dalam kurikulum pendidikan Cina (Dwiningrum, Deniar, & Rijal, 2022, hlm.118). Bahkan hingga saat ini banyak penduduk Cina maupun Korea yang masih sangat membenci Jepang.

Kurangnya materi sejarah pada K.D 3.6 kelas XI terkait pengaruh Perang Dunia II bagi Indonesia khususnya yang membahas tentang dampak pengaruh Jepang pasca perang Dunia II menjadi alasan lain penulis untuk melakukan penelitian tersebut. Dengan merambatnya produk Jepang seperti yang dijabarkan penulis sebelumnya yang membuat masyarakat Indonesia bahkan hingga sekarang tidak terlepas dari produk produk Jepang, penelitian ini memiliki urgensi tinggi untuk memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana produk produk tersebut diterima di Indonesia dan bagaimana hubungan Jepang dan Indonesia bisa terbentuk kembali pasca Perang Dunia II. Penulis berharap dengan dilakukan penelitian ini akan membuka wawasan baru bagi siswa maupun mahasiswa terkait dinamika hubungan kedua negara tersebut serta bagaimana pengaruh Jepang tetap bertahan dan berkembang di Indonesia hingga sekarang.

Kebaruan pada penelitian ini terdapat pada analisis terkait bagaimana Jepang menggunakan *soft power* seperti ekonomi, budaya, bantuan internasional untuk memperbaiki hubungan dengan negara negara yang dulu terdampak dari kolonialisme dan agresi militernya khususnya wilayah Asia Tenggara dimana hal ini berbeda dengan studi sebelumnya yang berfokus pada analisis politik luar negeri Jepang dari perspektik hubungan bilateral dan kemanan.

Penulis berharap dengan dilakukan penelitian ini dapat menjadi pengingat bagi generasi muda akan bagaimana kompleksnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang serta dapat mengetahui asal usul bagaimana produk produk Jepang bisa tersebar ke seluruh dunia salah satunya Indonesia sehingga penelitian diharapkan

dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengembangan dan penggunaan produk dalam negeri dan mengurangi ketergantungan akan produk luar Indonesia mengingat masyarakat Indonesia pada masa sekarang yang benar benar tidak bisa lepas dari produk asing salah satunya dari Jepang.

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan di atas, penulis ingin menelaah lebih lanjut terkait berbagai usaha dan proses yang dilakukan pemerintah Jepang dalam memulihkan hubungan luar negeri khususnya dengan wilayah bekas jajahannya di Asia pasca kekalahannya di Perang Dunia II. Penulis akan membahas khususnya kebijakan politik luar negeri yang diterapkan oleh mantan Perdana Menteri Jepang dari 1946 hingga 1987 dan pengaruhnya di masa sekarang bagi negara Jepang serta pengaruhnya ke negara negara di kawasan Asia. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di latar belakang tersebut, maka penulis ingin mengangkat judul penelitian “Politik Luar Negeri Jepang 1946-1987” Adapun alasan penulis mengambil tahun 1946 dikarenakan pada tahun tersebut Shigeru Yoshida terpilih sebagai perdana menteri Jepang dan mulai dikembangkannya doktrin Yoshida. Penelitian ini dibatasi sampai 1987 dikarenakan tahun tersebut munculnya doktrin terbaru yaitu Takeshita yang mengakhiri doktrin Fukuda.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan latar belakang di atas, penulis membagi pokok permasalahan dalam penelitian mengenai “Politik Luar Negeri Jepang 1946-1987” menjadi beberapa pertanyaan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi sosial - politik Jepang saat Perang Dunia II ?
2. Bagaimana kebijakan luar negeri dari 1945-1987 dalam memulihkan citra Jepang di mata Internasional ?
3. Apa saja dampak dari kebijakan kebijakan Politik Luar Negeri Jepang 1945-1987 terhadap negara negara di kawasan Asia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan pertanyaan yang diajukan di rumusan masalah di atas terkait penelitian “Politik Luar Negeri Jepang 1946-1987”, maka disusunlah tujuan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan pertanyaan di rumusan sebelumnya yang terdiri dari :

1. Mendeskripsikan kondisi sosial - politik Jepang saat Perang Dunia II
2. Mengidentifikasi kebijakan luar negeri Jepang dari 1945-1987 dalam memulihkan citra Jepang di mata Internasional
3. Mengidentifikasi dampak dari kebijakan kebijakan Politik Luar Negeri Jepang 1945-1987 terhadap negara negara di kawasan Asia

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran pada bidang Pendidikan Sejarah yang sedang mempelajari suatu peristiwa, khususnya mengenai sejarah perkembangan politik di Jepang.

2. Manfaat dari Segi Kebijakan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi terkait gambaran umum tentang Kebijakan Luar Negeri yang pernah diterapkan pemerintah

Jepang. Berdasarkan informasi tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan pandangan baru bagi pemerintah Indonesia terkait arah kebijakan luar negeri Indonesia kedepannya.

3. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bahan ajar bagi peserta didik SMA terkait materi Kelas XI, K.D 3.6 mengenai pengaruh Perang Dunia I dan Perang II terhadap kehidupan politik global khususnya sejarah negara Jepang pasca Perang Dunia II.
- b. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi rujukan untuk peneliti lainnya atau juga masyarakat sekitar dengan tema yang sama, khususnya sebagai bahan bacaan atau diskusi mahasiswa Pendidikan Sejarah.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Penulisan skripsi ini merujuk pada sistematika penulisan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia No. 7867/UN40/HK/2021 tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021. Berdasarkan pedoman tersebut, penulisan karya ilmiah penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara rinci terkait latar belakang yang mendasari pemilihan topik penelitian ini beserta permasalahan permasalahan yang akan ditelitinya. bab ini membahas secara singkat tentang kebijakan luar negeri Jepang di masa sekarang yang lebih mengarah ke pembentukan perjanjian perdagangan bebas dengan negara lain. Namun bila kita melihat puluhan tahun kebelakang, Kebijakan atau politik luar negeri Jepang saat tersebut sangat berbeda dengan sekarang. Sebelum kealahannya pada Perang Dunia II, Politik Luar Negeri Jepang lebih bersifat ekspansif atau militeristik. Hal ini dapat kita lihat khususnya pada masa Perang Dunia I dan II dimana Jepang mempunyai keinginan untuk membentuk negara Asia Timur Raya yang dipimpin oleh Jepang sendiri. Ekspansi ini dapat terlihat dari mulai adanya penyerangan Jepang ke Manchuria, adanya Perang Cina-Jepang II, hingga terjadinya Perang Pasifik yang dimulai oleh Jepang.

Namun semenjak kekalahannya dalam Perang Dunia II, negara matahari terbit ini berusaha mengubah politik luar negerinya dari yang Ekspansif menjadi negara cinta damai dan berusaha menjalin kerja sama dengan berbagai negara. Namun usaha pembentukan kerja sama Jepang ini tidak berlangsung mudah, mengingat kesalahan Jepang yang pernah dilakukannya pada masa Perang Dunia II khususnya ke negara negara di kawasan Asia. Dari latar belakang tersebut, peneliti membatasi masalah agar tidak melebar ke dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian dibagian akhir peneliti menambahkan sistematika penelitian yang memaparkan secara umum isi dari setiap bab yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini berisi tentang tinjauan terhadap sumber sumber yang akan digunakan dalam penelitian ini. Penulis akan membahas secara singkat isi dari sumber sumber yang akan digunakan beserta manfaat bagi penelitian ini. Selain itu bab ini juga memaparkan teori dan konsep yang penulis kutip dari buku maupun jurnal sebagai referensi untuk mendukung topik yang akan peneliti kaji yakni “Politik Luar Negeri Jepang 1946-1987” Dengan adanya kajian pustaka pada bab ini diharapkan menjadi landasan yang akan digunakan penulis untuk mengalisis permasalahan dalam Bab IV.

Bab III Metode Penelitian, bab ini membahas terkait rangkaian metode dan teknik penelitian yang akan digunakan penulis untuk mengkaji “Politik Luar Negeri Jepang 1946-1987”. Adapun rangkaian metode dan teknik yang penulis gunakan disini adalah metode penelitian Sejarah yang terdiri dari Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi, dan Historiografi. Mengingat tema penelitian yang penulis kaji disini merupakan sejarah luar negeri, maka teknik pengumpulan data yang digunakan penulis disini berupa studi pustaka meliputi kajian kajian literatur yang relevan dengan tema penelitian seperti buku, *ebook*, artikel/jurnal, dan sumber terpercaya lainnya.

Bab IV Temuan Dan Pembahasan, bab ini membahas jawaban dari rumusan masalah di Bab I berdasarkan fakta fakta yang penulis tafsirkan dari sumber sumber literatur berhubungan tema dan tentu dibantu dengan analisis konsep dan teori yang

telah dipaparkan di bab II. Pembahasan akan dimulai dari kondisi sosial politik negara Jepang masa Perang Dunia II dimana penulis akan coba mengaitkan dengan kebijakan politik luar negeri Jepang yang ekspasif pada saat tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang kebijakan kebijakan apa saja yang dikembangkan para perdana menteri Jepang yang menjabat saat tersebut dari 1946 hingga 1987 khususnya terkait usahanya dalam memulihkan citra Jepang di mata dunia. Dan pada bagian akhir, penulis akan memaparkan terkait dampak apa saja dari kebijakan atau politik luar negeri Jepang 1946-1987 bagi negara negara di kawasan Asia khususnya Indonesia.

Bab V Penutup, bab ini menyajikan kesimpulan terkait keseluruhan pembahasan yang sudah dilakukan di bab sebelumnya. Kesimpulan yang dimaksud disini lebih dikhususkan tentang jawaban dari pertanyaan pertanyaan yang sudah diajukan di Bab I. Penulis menyadari bahwa karta tulisan ini masih jauh dari kata sempurna karena hal tersebut selain kesimpulan bab ini juga berisi saran dan rekomendasi kepada setiap pihak yang ingin mengembangkan hasil penelitian yang dilakukan penulis.